

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat besar dan hampir semua bidang pasti ada pajak yang dibebankan, salah satunya adalah dalam perjanjian sewa beli . Perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian yang sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat, hanya saja pengaturannya belum secara rinci diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus. Walaupun ada peraturan yang mengaturnya ternyata hanya mengatur tentang perdirian perusahaan yang bergerak dalam perjanjian sewa beli saja, sehingga peraturan yang berlaku adalah peraturan umum yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya.

Dengan demikian apabila menyangkut suatu perjanjian maka pasti ada obyek yang menjadi pusat perhatian dalam perjanjian tersebut. Obyek ini yang akan menjadi permasalahan disini mengenai bagaimana pembebanan pajak atas obyek perjanjian sewa beli tersebut, pajak apa saja yang dapat dibebankan dan bagaimana pelaksanaan pemungutan pajaknya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa beli tersebut.

Kata kunci : Perjanjian Sewa Beli – Obyek perjanjian – Pajak yang dibebankan

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994 **Perubahan atas UU No 8 / 1983** tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 **Perubahan Kedua atas UU No 6 / 1983** tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 **Perubahan Kedua atas UU No 8 / 1983** tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

Burgerlijk Wetboek (BW)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984*

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong*

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang *Perizinan Beli sewa (hire purchase), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (renting)*

DAFTAR ISI